

Analisis Faktor Geopolitik di Balik Ambisi Maritim Indonesia Dalam Lingkup Regional dan Global

Risa Amalia Kurniawati^{1*}, Nurul Khotimah², Gunawan Santoso³

^{1,2}Universitas Negeri Yogyakarta

³Universitas Muhamamdiyah Jakarta

*Corresponding email: risaamalia.2023@student.uny.ac.id

Abstrak – Artikel ini menganalisis faktor geopolitik yang mendorong ambisi maritim Indonesia dalam konteks persaingan kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik. Dengan posisi strategis sebagai negara kepulauan, Indonesia berperan penting dalam menjaga stabilitas regional, memanfaatkan potensi ekonomi biru, dan mengelola tantangan seperti sengketa wilayah serta ancaman keamanan maritim. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengeksplorasi kebijakan maritim Indonesia melalui analisis dokumen resmi, teori geopolitik, serta dinamika regional dan global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi maritim Indonesia bertumpu pada diplomasi regional, peningkatan infrastruktur, modernisasi angkatan laut, dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Namun, koordinasi lintas sektor, tantangan eksternal, serta isu keberlanjutan lingkungan menjadi hambatan utama. Artikel ini menawarkan rekomendasi kebijakan untuk mendukung visi Indonesia sebagai poros maritim dunia, mencakup penguatan diplomasi, investasi infrastruktur, modernisasi pertahanan, dan kebijakan lingkungan terpadu.

Kata Kunci: Geopolitik, Ambisi Maritim Indonesia, Indo-Pasifik, Diplomasi Maritim, Keamanan Laut

Abstract – This article analyzes the geopolitical factors driving Indonesia's maritime ambitions in the context of great power competition in the Indo-Pacific region. With its strategic position as an archipelagic state, Indonesia is important in maintaining regional stability, capitalizing on its blue economy potential, and managing challenges such as territorial disputes and maritime security threats. Using a descriptive qualitative approach, this research explores Indonesia's maritime policy by analyzing official documents, geopolitical theory, and regional and global dynamics. The results show that Indonesia's maritime strategy relies on regional diplomacy, infrastructure improvement, naval modernization, and sustainable environmental management. However, cross-sector coordination, external challenges, and environmental sustainability issues are the main obstacles. This article offers policy recommendations to support Indonesia's vision as a world maritime axis, including strengthening diplomacy, infrastructure investment, defense modernization, and integrated environmental policies.

Keywords: Geopolitics, Indonesia's Maritime Ambitions, Indo-Pacific, Maritime Diplomacy, Maritime Security.

Pendahuluan

Faktor geopolitik di balik ambisi maritim Indonesia menjadi semakin relevan dalam konteks persaingan kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik. Posisi strategis Indonesia sebagai negara kepulauan menempatkannya pada titik sentral jalur perdagangan maritim utama, sehingga menjadikannya target pengaruh dari negara-negara adikuasa. Di tengah persaingan ini, Indonesia dituntut untuk berperan aktif menjaga stabilitas kawasan dan menghindari konflik yang dapat

merugikan kepentingan nasional. Inisiatif seperti *Belt and Road Initiative* (BRI) telah menunjukkan betapa kompleksnya dinamika geopolitik di kawasan. Setiap keputusan yang diambil Indonesia, baik mendukung maupun menolak inisiatif semacam itu, memiliki konsekuensi geopolitik yang signifikan (Fathun, 2016). Selain itu, sengketa Laut China Selatan juga menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia, mengingat pentingnya peran negara ini dalam menjaga persatuan ASEAN. Ancaman terhadap keamanan maritim Indonesia semakin nyata dengan maraknya kegiatan illegal fishing, pelanggaran batas wilayah, dan kejahatan lintas negara.

Posisi geografis Indonesia yang unik sebagai penghubung dua samudra menjadi aset sekaligus tantangan dalam pengelolaan wilayah laut yang luas. Potensi sumber daya laut yang melimpah seharusnya dapat menjadi motor penggerak perekonomian nasional, namun berbagai kendala seperti keterbatasan anggaran dan koordinasi lintas sektor masih menjadi hambatan (Safira, 2018). Untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maritim yang kuat, diperlukan kebijakan maritim yang komprehensif dan berkelanjutan (Asbari et al., 2023). Kebijakan tersebut harus mencakup pembangunan infrastruktur maritim, peningkatan kapasitas pertahanan laut, serta diplomasi maritim yang aktif (Wahyudin et al., 2023). Pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor geopolitik menjadi kunci dalam merumuskan strategi yang efektif untuk menghadapi tantangan di masa depan. Dalam konteks perubahan iklim dan isu keberlanjutan, kebijakan maritim Indonesia juga harus adaptif dan responsif.

Indonesia perlu menyeimbangkan antara pemanfaatan sumber daya laut dengan upaya pelestarian lingkungan (Prakoso et al., 2024). Dengan demikian, Indonesia dapat memperkuat kedaulatannya dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di tingkat global. Singkatnya, analisis faktor geopolitik di balik ambisi maritim Indonesia memberikan wawasan penting bagi berbagai pihak, mulai dari akademisi, peneliti, hingga pembuat kebijakan. Pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika geopolitik di kawasan Indo-Pasifik akan membantu Indonesia dalam merumuskan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan nasionalnya, yaitu menjadi negara maritim yang kuat, mandiri, dan berdaulat (Suprianto, 2014).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif deskriptif* untuk memahami dinamika faktor geopolitik yang mendorong kebijakan maritim Indonesia. Sumber data sekunder menggunakan analisis dokumen kebijakan, seperti RPJMN, visi Poros Maritim Dunia, laporan kementerian Jurnal ilmiah, laporan internasional (ASEAN, UN), serta berita terkait. Metode pengumpulan data menggunakan analisis literatur terkait kebijakan maritim Indonesia dan dinamika geopolitik di Indo-Pasifik. Penelitian menggunakan teori geopolitik klasik dan kontemporer untuk menganalisis faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi kebijakan maritim Indonesia. Beberapa kerangka kerja

yang digunakan: (1) Teori Kekuatan Maritim Alfred Thayer Mahan yang Menjelaskan pentingnya kekuatan laut dalam mendukung posisi strategis Indonesia. (2) Pendekatan Regionalisme dan Multilateralisme yang menganalisis peran Indonesia dalam diplomasi maritim ASEAN dan global. Prosedur analisis data menggunakan analisis konten yang membandingkan isi kebijakan pemerintah dengan tren geopolitik global dan regional.

Hasil dan Pembahasan

1. Konteks Strategi Maritim Indonesia

a) Karakteristik Geografis dan Lokasi Strategis

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memainkan peran penting dalam peta geopolitik dan ekonomi global (Anggo et al., 2023). Dengan luas wilayah sekitar 1,9 juta km² dan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia memiliki posisi strategis di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selain itu, Indonesia menghubungkan dua benua, yaitu Asia dan Australia, menjadikannya sebagai jalur pelayaran internasional utama. Salah satu wilayah yang memiliki peran strategis adalah Selat Malaka, yang merupakan salah satu selat tersibuk di dunia. Selat ini sangat penting bagi perdagangan global karena sekitar 40% total perdagangan dunia melewatinya. Ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap sektor maritim sangat signifikan. Sektor seperti perikanan, perdagangan, dan transportasi laut menyumbang kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, potensi ekonomi biru di Indonesia, termasuk eksplorasi minyak, gas, dan sumber daya laut lainnya, memberikan peluang besar untuk memperkuat perekonomian nasional. Namun, potensi ini hanya dapat diwujudkan melalui pengelolaan yang berkelanjutan, sehingga eksploitasi sumber daya tidak merusak lingkungan dan tetap mendukung kesejahteraan masyarakat di masa depan.

Selain peluang, lokasi geografis Indonesia juga menghadirkan tantangan signifikan, terutama dalam hal keamanan maritim. Perairan Indonesia menghadapi ancaman seperti perompakan, penangkapan ikan ilegal, dan sengketa wilayah dengan negara-negara tetangga (Subagio et al., 2022). Hal ini menjadikan pengawasan terhadap Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebagai prioritas utama untuk melindungi kedaulatan negara dan menghindari eksploitasi sumber daya laut oleh pihak asing yang tidak bertanggung jawab (Graduate Binus University, 2024). Untuk menjaga stabilitas keamanan maritim, diperlukan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat internasional. Dalam hal ini, Indonesia telah berupaya memperkuat kapasitas pertahanan lautnya serta mengadopsi kebijakan yang mendukung penegakan hukum di perairannya. Posisi strategis Indonesia memberikan peluang untuk meningkatkan peran diplomasi maritim, baik dalam konteks perdagangan maupun keamanan. Melalui kerjasama bilateral dan multilateral, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai pemimpin regional di kawasan Indo-Pasifik. Diplomasi

maritim juga memungkinkan Indonesia untuk menjadi penengah dalam konflik kawasan, seperti sengketa di Laut China Selatan, serta menjalin hubungan baik dengan negara-negara besar seperti China dan Amerika Serikat (Populis Journal, 2019). Upaya diplomasi ini tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi tetapi juga memperkuat pengaruh geopolitik Indonesia. Dengan demikian, posisi strategis Indonesia dapat dimanfaatkan untuk mendorong stabilitas dan pembangunan kawasan.

b) Ketergantungan Ekonomi pada Laut

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki laut yang mencakup sekitar 70% dari total wilayahnya. Potensi besar ini, belum dimanfaatkan secara optimal. Kontribusi sektor maritim terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional masih relatif rendah, yaitu hanya sekitar 7,9%. Padahal, sektor ini memiliki potensi besar untuk memperkuat perekonomian nasional dan menciptakan lapangan kerja baru (Bisnis, 2024). Dengan pemanfaatan yang lebih efektif, laut dapat menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Ketergantungan ekonomi Indonesia pada laut tercermin dari tiga sektor utama: perikanan, perdagangan, dan transportasi laut. Sektor perikanan, meskipun memiliki potensi besar, hanya berkontribusi sekitar 2,8% terhadap PDB. Ini menunjukkan perlunya upaya lebih besar dalam investasi dan pengelolaan sumber daya perikanan untuk meningkatkan hasil dan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional. Sektor perdagangan dan transportasi laut, di sisi lain, memegang peranan penting dalam meningkatkan konektivitas antar pulau dan efisiensi logistik. Kedua sektor ini tidak hanya mendukung perdagangan domestik tetapi juga memperkuat peran Indonesia dalam perdagangan internasional. Melalui pengembangan infrastruktur maritim yang lebih baik, Indonesia dapat memperluas pengaruh ekonominya di kawasan Indo-Pasifik.

- Potensi Ekonomi Biru

Salah satu peluang terbesar Indonesia dalam memanfaatkan laut adalah melalui ekonomi biru, yang mencakup kegiatan berkelanjutan seperti budidaya perikanan, pariwisata bahari, dan pengembangan energi terbarukan dari laut. Menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, proyeksi nilai tambah ekonomi biru Indonesia dapat mencapai US\$30 triliun pada tahun 2030 jika potensi ini dikelola dengan baik (Media Indonesia, 2023). Namun, untuk merealisasikan potensi tersebut, Indonesia harus menghadapi tantangan besar seperti kemiskinan di wilayah pesisir, dampak perubahan iklim, dan polusi plastik. Langkah-langkah konkret seperti pengelolaan limbah laut dan adaptasi terhadap perubahan iklim diperlukan untuk memastikan keberlanjutan ekonomi biru.

- Relevansi Ekonomi, Sosial dan Lingkungan

Peningkatan ketergantungan ekonomi pada laut tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi tetapi juga pada aspek sosial dan lingkungan. Pengelolaan sektor maritim secara

berkelanjutan, Indonesia dapat menciptakan lapangan kerja baru, terutama di wilayah pesisir, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pengelolaan sumber daya laut yang baik akan membantu melestarikan keanekaragaman hayati laut dan ekosistem yang penting bagi keberlanjutan kehidupan manusia (DFW, 2024).

c) Kedaulatan dan Keamanan Maritim

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga kedaulatan dan keamanan maritimnya. Wilayah laut yang luas menjadikan Indonesia rentan terhadap berbagai ancaman, seperti perompakan, penangkapan ikan ilegal, dan sengketa wilayah. Keamanan maritim tidak hanya menjadi isu nasional tetapi juga merupakan bagian penting dari stabilitas regional di kawasan Indo-Pasifik. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia menjadi sangat relevan untuk memahami langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan demi menjaga kedaulatan negara.

- Ancaman Perompakan dan Penangkapan Ikan Ilegal

Perompakan masih menjadi salah satu tantangan signifikan di perairan Indonesia. Data dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan pengawasan, kasus perompakan tetap terjadi, terutama di wilayah-wilayah perairan yang ramai (Kemenko Marves, 2024). Selain itu, penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing menjadi masalah serius yang tidak hanya merugikan nelayan lokal tetapi juga mengancam keberlanjutan sumber daya laut Indonesia. Aktivitas ilegal ini telah mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan dan menurunkan hasil tangkapan nelayan tradisional (Apriani, 2021). Untuk mengatasi ancaman ini, Indonesia telah melakukan berbagai langkah, termasuk meningkatkan patroli laut dan memperkuat penegakan hukum di perairan nasional. Namun, perlunya teknologi modern, seperti sistem pemantauan kapal berbasis satelit, menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan keamanan maritim yang lebih efektif.

- Sengketa Wilayah di Laut Cina Selatan dan Natuna

Sengketa wilayah laut merupakan salah satu tantangan geopolitik yang kompleks bagi Indonesia, terutama di kawasan Laut Natuna Utara yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Ketegangan yang sering terjadi dengan negara-negara tetangga terkait klaim wilayah laut menciptakan ketidakstabilan regional (Keliat, 2019). Klaim sepihak oleh beberapa negara di kawasan ini telah memengaruhi aktivitas Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)-nya.

- Pentingnya Pengawasan ZEE

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang mencapai 2,7 juta km² memberikan hak eksklusif kepada negara untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya laut.

Namun, pengawasan terhadap ZEE menghadapi berbagai kendala, termasuk minimnya teknologi modern dan tantangan geografis yang kompleks. Penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing sering terjadi di ZEE Indonesia, yang memerlukan pengawasan ketat agar sumber daya laut tidak dieksploitasi secara ilegal (Jurnal Lemhannas RI, 2019). Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, diperlukan integrasi antar lembaga seperti TNI Angkatan Laut, Bakamla, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemanfaatan teknologi seperti drone dan sistem radar juga menjadi solusi yang dapat membantu menjaga wilayah perairan dari aktivitas ilegal. Indonesia perlu memperkuat posisi diplomatiknya melalui kerjasama internasional untuk menangani sengketa ini. Langkah ini dapat melibatkan peran aktif dalam forum regional seperti ASEAN, sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap wilayah ZEE agar hak-hak Indonesia atas sumber daya laut dapat dijaga dengan baik (Anwar, 2016).

2. Faktor Geopolitik yang Mendorong Ambisi Maritim Indonesia

a) Dinamika Regional

Indonesia, sebagai negara anggota aktif ASEAN, memainkan peran penting dalam memperkuat kerjasama maritim di kawasan. Indonesia mendorong pembahasan mengenai Kode Etik di Laut Cina Selatan, bertujuan untuk meredakan ketegangan dan membangun kepercayaan antar negara anggota ASEAN. Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto, Indonesia berkomitmen untuk menciptakan kondisi damai di Laut Cina Selatan dan mendukung negara-negara yang bersengketa agar mencapai kesepakatan. Hal ini mencerminkan upaya Indonesia tidak hanya untuk melindungi kepentingan nasionalnya tetapi juga menjaga stabilitas kawasan. Indonesia mengambil sikap tegas terhadap klaim sepihak China di Laut Cina Selatan yang berdampak pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna. Meskipun tidak terlibat langsung dalam sengketa tersebut, tindakan agresif China mendorong Indonesia untuk meningkatkan patroli maritim dan diplomasi guna mempertahankan kedaulatan atas wilayahnya (Jurnal DPR RI, 2023). Ini mencerminkan ambisi Indonesia untuk menjadi pemimpin dalam penyelesaian konflik di kawasan serta menegaskan haknya atas sumber daya laut yang ada di ZEE Indonesia.

b) Persaingan Kekuasaan Global

Indonesia mengambil sikap tegas terhadap klaim sepihak China di Laut Cina Selatan yang berdampak pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna. Meskipun tidak terlibat langsung dalam sengketa tersebut, tindakan agresif China mendorong Indonesia untuk meningkatkan patroli maritim dan diplomasi guna mempertahankan kedaulatan atas wilayahnya (Jurnal DPR RI, 2023). Ini mencerminkan ambisi Indonesia untuk menjadi pemimpin dalam penyelesaian konflik di kawasan serta menegaskan haknya atas sumber daya laut yang ada di ZEE Indonesia. Rivalitas antara Amerika Serikat dan China di perairan Indo-Pasifik memberikan dampak yang signifikan terhadap

kebijakan luar negeri Indonesia. Sebagai negara non-blok, Indonesia harus bijak dalam menavigasi hubungan dengan kedua kekuatan besar ini, sambil tetap mempertahankan posisinya dalam menjaga kedaulatan dan keamanan maritimnya (RUSI Newsbrief, 2024). Indonesia memiliki kesempatan untuk berperan sebagai mediator dalam konflik regional, tetapi juga menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan kepentingan nasional di tengah ketegangan global. Sebagai negara non-blok, Indonesia memiliki kesempatan untuk membangun hubungan kerjasama dengan berbagai pihak tanpa terjebak dalam rivalitas antara AS dan China. Namun, Indonesia juga menghadapi tantangan besar dalam menjaga kedaulatan wilayah dan menghadapi tekanan dari kekuatan global untuk mengakomodasi kepentingan strategis mereka. Indonesia perlu memanfaatkan posisinya untuk menarik investasi dalam infrastruktur maritim tanpa mengorbankan kedaulatan wilayahnya (East Asia Forum, 2024).

c) **Keuntungan Ekonomi dan Jalur Perdagangan**

Sebagai negara yang menguasai chokepoint strategis, seperti Selat Malaka, Indonesia memegang peranan penting dalam menjaga jalur perdagangan internasional. Keamanan jalur ini sangat vital baik bagi perekonomian global maupun nasional, mengingat bahwa lebih dari 40% perdagangan dunia melintasi Selat Malaka. Oleh karena itu, upaya meningkatkan keamanan maritim di chokepoint ini menjadi prioritas utama Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memfokuskan perhatian pada pengembangan infrastruktur maritim sebagai salah satu upaya meningkatkan daya saing dalam perdagangan internasional. Pemerintah Indonesia berupaya untuk memperkuat pelabuhan dan sistem transportasi laut, yang akan membantu menarik lebih banyak investasi asing dan memperkuat konektivitas perdagangan antar pulau di Indonesia (Center for Preventive Action, 2022).

d) **Kebijakan Pertahanan Strategis**

Kebijakan "Poros Maritim Dunia" yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo menekankan penguatan sektor maritim Indonesia sebagai bagian dari strategi pertahanan nasional. Kebijakan ini mencakup modernisasi angkatan laut serta peningkatan kehadiran militer di perairan strategis Indonesia. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa Indonesia dapat melindungi kedaulatan wilayah lautnya dan berkontribusi pada stabilitas regional (Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik, 2017). Sebagai bagian dari strategi pertahanan maritim, modernisasi angkatan laut Indonesia menjadi langkah penting untuk menghadapi berbagai ancaman maritim, termasuk ancaman dari kapal asing yang melakukan penangkapan ikan ilegal. Dengan meningkatkan kemampuan pertahanan maritim, Indonesia dapat lebih efektif dalam menjaga kedaulatan wilayah dan melindungi sumber daya laut dari eksploitasi ilegal (Jurnal Lemhannas RI, 2019).

3. Tantangan dalam Mewujudkan Ambisi Maritim Indonesia

a). Tantangan Internal

Koordinasi antar lembaga maritim yang kurang efektif menjadi salah satu tantangan utama dalam mewujudkan ambisi maritim Indonesia. Banyaknya lembaga yang terlibat dalam pengelolaan dan pengawasan maritim, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan TNI Angkatan Laut, seringkali menyebabkan tumpang tindih tugas dan kurangnya sinergi. Hal ini mengakibatkan kebijakan yang tidak terintegrasi dan pelaksanaan program yang kurang efektif. Sebuah studi menunjukkan bahwa ketidakjelasan dalam pembagian tugas antar lembaga menghambat upaya untuk meningkatkan keamanan dan pengelolaan sumber daya laut secara optimal. Keterbatasan infrastruktur di wilayah kepulauan terpencil juga menjadi tantangan signifikan. Meskipun Indonesia memiliki banyak pulau, infrastruktur maritim yang memadai masih sangat terbatas, terutama di daerah terpencil. Pelabuhan-pelabuhan kecil sering kali tidak dapat menampung kapal-kapal besar, sehingga menghambat arus barang dan orang antar pulau. Tanpa infrastruktur yang baik, upaya untuk meningkatkan konektivitas dan memperkuat ekonomi maritim akan sulit dicapai.

b). Tantangan Eksternal

Perselisihan regional dengan negara tetangga merupakan tantangan eksternal yang tidak dapat diabaikan. Konflik di Laut Cina Selatan, khususnya terkait klaim wilayah oleh Tiongkok, menempatkan Indonesia pada posisi yang sulit. Meskipun Indonesia bukan pihak langsung dalam perselisihan ini, klaim Tiongkok atas bagian ZEE Indonesia di Natuna memicu ketegangan dan memerlukan respons diplomatik dan militer yang hati-hati. Hal ini menimbulkan tekanan bagi Indonesia untuk memperkuat kehadiran militernya di perairan strategis sekaligus menjaga hubungan baik dengan negara-negara besar. Menjaga keseimbangan hubungan dengan negara-negara besar seperti Tiongkok dan Amerika juga menjadi tantangan bagi Indonesia. Dalam konteks persaingan AS dan China di kawasan Indo-Pasifik, Indonesia harus berhati-hati dalam merumuskan kebijakan luar negerinya agar tidak terjebak dalam konflik kepentingan. Keterlibatan dalam berbagai forum internasional dan kerja sama bilateral diperlukan untuk memastikan Indonesia dapat mempertahankan kedaulatan sekaligus menarik investasi dari kedua kekuatan tersebut.

c). Masalah Lingkungan

Dampak perubahan iklim terhadap kenaikan permukaan laut dan ekosistem laut menjadi masalah lingkungan yang semakin mendesak. Perubahan iklim dapat mengancam keberlanjutan sumber daya laut serta kehidupan masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya tersebut. Kenaikan permukaan laut dapat menyebabkan hilangnya pulau-pulau kecil dan berdampak pada komunitas yang tinggal di daerah pesisir. Polusi laut dan eksploitasi sumber daya secara berlebihan juga merupakan isu serius yang harus ditangani. Penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing menyebabkan kerugian besar bagi perekonomian Indonesia, sementara polusi dari limbah industri dan plastik mengancam

kesehatan ekosistem laut. Diperlukan kebijakan yang lebih ketat untuk melindungi lingkungan laut agar potensi maritim dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi poros maritim dunia, banyak faktor internal dan eksternal yang harus dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan tersebut.

Modernisasi angkatan laut Indonesia harus menjadi prioritas untuk menghadapi berbagai ancaman maritim yang ada. Pengadaan kapal-kapal perang modern dan pelatihan personel TNI Angkatan Laut (TNI AL) harus dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia. Selain itu, kapasitas penjaga pantai perlu ditingkatkan agar lebih efektif dalam mengawasi perairan Indonesia yang luas (Jurnal Prodi Ilmu Pertahanan, 2020). Peningkatan pengawasan terhadap Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia menjadi langkah penting untuk mencegah penangkapan ikan ilegal dan aktivitas ilegal lainnya. Teknologi canggih, seperti drone dan satelit, dapat digunakan untuk memantau wilayah laut yang luas dengan lebih efektif dan efisien (Jurnal Manajemen Logistik dan Transportasi, 2023).

Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang terpadu, mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan upaya konservasi lingkungan laut. Perlindungan terhadap ekosistem laut harus menjadi prioritas, dengan penekanan pada pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan (Populis Journal, 2019). Indonesia harus aktif berpartisipasi dalam kesepakatan internasional terkait perlindungan lingkungan maritim, seperti Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) dan kesepakatan global terkait perubahan iklim. Dengan berpartisipasi dalam kesepakatan ini, Indonesia tidak hanya melindungi sumber daya lautnya, tetapi juga berkontribusi pada upaya internasional untuk menjaga kesehatan ekosistem laut (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, 2017).

Kesimpulan

Indonesia harus memperkuat kerjasama dengan negara-negara ASEAN untuk menciptakan stabilitas dan keamanan maritim di kawasan. Melalui forum-forum regional seperti *ASEAN Regional Forum* (ARF) dan *East Asia Summit* (EAS), Indonesia dapat memainkan peran penting dalam membahas isu-isu maritim yang bersifat lintas negara, seperti perompakan dan penangkapan ikan ilegal. Selain itu, Indonesia juga perlu memperkuat partisipasinya dalam kerangka kerja Indo-Pasifik yang dipimpin oleh Amerika Serikat guna memperkuat posisi negara di tengah persaingan kekuatan besar di kawasan tersebut (Jurnal Prodi Ilmu Pertahanan, 2020). Sebagai negara yang memiliki pengaruh di kawasan, Indonesia berpotensi besar untuk menjadi mediator dalam konflik maritim, terutama di Laut Cina Selatan. Dengan menawarkan platform dialog bagi negara-negara yang bersengketa, Indonesia tidak hanya akan meningkatkan reputasinya sebagai pemimpin regional, tetapi

juga menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional. Investasi dalam infrastruktur maritim sangat penting untuk meningkatkan konektivitas antar pulau di Indonesia. Pemerintah harus memprioritaskan pembangunan pelabuhan baru serta modernisasi pelabuhan yang ada, seperti Pelabuhan Patimban dan Tanjung Priok. Selain itu, pengembangan galangan kapal juga perlu didorong untuk mendukung industri perkapalan lokal. Dengan sistem logistik berbasis teknologi, efisiensi distribusi barang di Indonesia dapat meningkat, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah perlu berinvestasi dalam pengembangan armada perikanan untuk memastikan keberlanjutan penangkapan ikan dan mendukung nelayan dengan teknologi modern. Selain itu, riset kelautan yang lebih mendalam diperlukan untuk menggali potensi sumber daya laut yang ada serta memahami dampak lingkungan dari aktivitas manusia di laut.

Referensi

- Anwar, S. (2016). Membangun Keamanan Maritim Indonesia Dalam Analisa Kepentingan, Ancaman, dan Kekuatan Laut. *Jurnal Pertahanan*, 6(3), 71-85.
- Apriani, D. A. (2021). Strategi Keamanan Laut Pemerintah Indonesia untuk Menjaga Keamanan Maritim. *Jurnal Nusantara*.
- Bisnis. (2024). Kontribusi Sektor Kelautan Terhadap PDB Nasional Saat Ini Baru Mencapai 7,9 Persen.
- Center for Preventive Action. (2022). ASEAN Chairmanship 2023: Indonesia's Tendency to Solve the South China Sea Territorial Disputes.
- DFW. (2024). Kontribusi Sektor Perikanan Dalam Pertumbuhan Ekonomi Dalam Era Pemerintahan Baru.
- Fathun, L. M. (2016). *Kebijakan Geopolitik Poros Maritim di Era Jokowi Dalam Filosofi Frame Ideologis*. Jurnal Hubungan Internasional.
- Graduate Binus University. (2024). Mengulik Potensi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia. Diakses dari <https://graduate.binus.ac.id>.
- Jurnal Lemhannas RI. (2019). Penanganan Keamanan Maritim Perbatasan Wilayah Laut dan Dampaknya pada Aspek Pertahanan Keamanan.
- Jurnal Lemhannas RI. (2019). Penanganan Keamanan Maritim Perbatasan Wilayah Laut dan Dampaknya pada Aspek Pertahanan Keamanan.
- Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik. (2017). Peran Pemerintah Indonesia dalam Mengelola Konflik Laut China Selatan.
- Keliat, M. (2019). Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya Bagi Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 113-126.
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. (2024). Jakarta Geopolitical Forum 2024: Menko Luhut Tekankan Kolaborasi Internasional untuk Keamanan Maritim.
- Media Indonesia. (2023). Kontribusi PDB Maritim Indonesia Baru 7%, Ekonomi Biru Perlu Dieksplorasi.
- Populis Journal. (2019). Strategi Indonesia Dalam Mewujudkan Poros Maritim Dunia di Tengah Kebijakan Jalur Sutra Maritim China. Diakses dari <https://journal.unas.ac.id>.

- Prakoso, L. Y., et al. (2024). *Geopolitik Dalam Konteks Keamanan Maritim*. Penerbit Widina Media Utama.
- Safira. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Geopolitik Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia*. Sovereign: Jurnal Hubungan Internasional.
- Suprianto, M. (2014). *Geostrategi Indonesia Dalam Dinamika Politik Global*. Jurnal Kajian Lemhannas RI.
- Yani, Y. M., & Montratama, I. (2018). *Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia: Suatu Tinjauan Geopolitik*. Jurnal Pertahanan & Bela Negara, 5(2), 29-45.
- Anggo, A. Y., Santoso, G., Wuriyani, D., & Bosawer, A. (2023). Mengidentifikasi Peluang dan Tantangan yang Muncul dari Keragaman Budaya Indonesia Secara Mandiri dan Critical Thinking Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT). *Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT)*, 02(04), 310–331.
- Asbari, M., Santoso, G., & Rantina, M. (2023). Mengendalikan Obsesi Pada Kehidupan Sehari-Hari Kita. *Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT)*, 02(03), 44–46.
- Subagio, H., Yulianto, W. W. E., Prasetyo, D., & Muharam, R. S. (2022). Penguatan Karakter Bela Negara di Era Revolusi Digital Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 7(1), 79–93. <https://doi.org/10.21067/jmk.v7i1.6886>
- Wahyudin, I., Santoso, G., Hatapayo, A. A., Hadi, M. S., Iswan, I., Suradika, A., & Susanto, A. (2023). Budaya dalam Kreativitas melalui Penerapan Berkebinekaan Global Di Kelas VII. *Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT)*, 02(04), 2023.